

RENJA

2019

Rencana Kerja



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PERIKANAN TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sitematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKT DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASER TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun lalu dan Capaian Renstra PD	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan PD	12
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan	21
3.3 Program dan Kegiatan	23
BAB V. PENUTUP	
LAMPIRAN	

Tabel Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2019 Dan Perkiraan Maju Tahun 2020

DAFTAR TABEL

Tabel T-II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra PD S/d Tahun 2017 Kabupaten Paser	10
Tabel T-II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perikanan Kabupaten Paser	20
Tabel T-II.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Paser	24
Tabel T-II.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Kabupaten Paser	28
Tabel T-III.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Paser	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Paser tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Paser tahun 2017-2021. Renja adalah dokumen perencanaan yang dilaksanakan merupakan rencana tahun kedua dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Paser.

Rencana Kerja PD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2019 yang

merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan dan didalamnya memuat kebijakan pembangunan tahun anggaran 2019.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2019 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA – APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Paser tahun 2019 yang menjadi dasar dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Paser tahun 2019, khususnya pada Dinas Perikanan Kabupaten Paser.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser tahun 2019 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2019 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2019 Dinas Perikanan Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perikanan tahun 2019 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Acuan pelaksanaan target kinerja tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan Kabupaten Paser selama tahun 2018.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RKT PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKT PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

PD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD
- 3.3. Program dan Kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASER TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Paser adalah sebagai perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2016-2021.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan pada tahun 2019 melaksanakan program dan kegiatan.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, yang dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2017

Pada Tahun 2017 Dinas Perikanan Kabupaten Paser mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10,548,926,690.00, untuk mendukung 13 program dan 38 kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 8,564,417,162.00, atau 81,19%, anggaran yang tidak terserap tersebut

berasal dari sisa proses pengadaan/pelelangan pekerjaan, perjalanan dinas serta belanja barang dan jasa lainnya sehingga dapat penghematan sebesar Rp. 521.889.200,- .

2.1.2. PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN ANGGARAN 2018

Sedangkan untuk tahun anggaran 2018 Dinas Perikanan Kabupaten Paser mendapat alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.344.048.489,00, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.175.311.920,35, untuk mendukung 13 program dan 47 kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut bersumber dana dari APBD II, Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim dan Dana Alokasi Khusus (DK) Kelautan dan Perikanan tahun 2018.

Berikut indikator kinerja Dinas Perikanan Tahun 2018.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	15.552
		Jumlah produktivitas perikanan budidaya (ton/ha/tahun)	
		Produktivitas budidaya air tawar (ton/ha/th)	0,91
		Produktivitas budidaya air payau (ton/ha/th)	0,58
		Produktivitas budidaya laut (ton/ha/th)	25,00
		Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	11.305
		Rata-rata produktivitas nelayan (ton/nelayan/tahun)	2,96
2	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Menciptakan Produk Olahan Hasil Perikanan yang Berdaya Saing, Aman dan Sehat	Jumlah produk olahan hasil perikanan (ton)	2.464
		Persentase produk perikanan yang memiliki standar mutu (%)	15
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan	Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu (%)	100
		Persentase SKPD yang mempunyai data SIPD secara lengkap (%)	40
		Persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi (%)	30
		Cakupan masyarakat perikanan yang diberdayakan (%)	15,00
		Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu (%)	100
		Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan (%)	95
		Tingkat maturitas SPIP (Level)	2
4	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah	Persentase SKPD yang terlayani (%)	100
		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur (%)	100
		Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS (%)	30

Untuk mencapai target tersebut, maka strategi yang diterapkan adalah :

- Peningkatan SDM Perikanan
- Penerapan teknologi dibidang perikanan
- Fasilitasi sarana dan prasarana budidaya, penangkapan dan pengolahan hasil perikanan

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sedangkan Fungsi dari Dinas Perikanan Kabupaten Paser ini adalah dalam hal :

1. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta penguatan daya saing produk perikanan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
2. penetapan kebijakan di bidang perikanan;
3. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta penguatan daya saing produk perikanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
5. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Paser, maka susunan

organisasi satuan kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang Lainnya.

2. Sekretaris

Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian sebagai berikut :

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perikanan Tangkap

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Seksi sebagai berikut :

- Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Perizinan
- Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
- Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil

4. Bidang Perikanan Budidaya

Kepala Bidang Perikanan Budidaya dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Seksi sebagai berikut :

- Seksi Pembinaan Pembudidayaan Ikan
- Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
- Seksi Kelembagaan dan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan

5. Bidang Penguatan dan Daya Saing Produk Perikanan

Kepala Bidang Penguatan dan Daya Saing Produk Perikanan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Seksi sebagai berikut :

- Seksi Bina Mutu Produk Perikanan
- Seksi Pengembangan Usaha Produk Perikanan
- Seksi Pemasaran Produk Perikanan

Sedangkan untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

a. UPT Balai Benih Udang

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang produksi, pelayanan usaha dan jasa perikanan budidaya air payau. UPT BBU mempunyai tugasL:

- Pelaksanaan produksi benih dan budidaya udang Air payau
- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga, dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Susunan organisasi UPT BBU terdiri atas :

- Kepala UPT
- Sub Bagian Tata Usaha
- Kelompok Kerja

B. Pelayanan OPD

1. Sesuai dengan PP 38 bahwa urusan Pemerintah terdiri atas urusan Pemerintahan dan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan Pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang terdiri dari atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Dinas Perikanan Kabupaten Paser adalah bertugas untuk menyelenggarakan urusan pilihan bidang Perikanan sebagai mana ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser.

2. Pelayanan Publik di bidang perikanan dilakukan, dengan :

- Kaji terap teknologi perikanan;
- Melakukan sosialisasi teknologi perikanan;
- Pelayanan fasilitas prasarana perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan dan prasarana budidaya;
- Pelayanan fasilitas Usaha;
- Pelayanan usaha melalui uji kualitas air dan jasa usaha yang meliputi penjualan benih/bibit udang yang dilakukan oleh UPT BBU serta penjualan es balok, ehingga hal ini berdampak pada perolehan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 oleh Dinas Perikanan Kabupaten Paser sebagai berikut :

No	Uraian	Target	Realisasi
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
	Hasil Retribusi Daerah	125.000.000,-	152.930.000,-
	Hasil Penjualan Es Balok	25.000.000,-	62.910.000,-
	Jumlah	150.000.000,-	215.840.000,-

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN PD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Paser, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka maka ditentukan isu strategis Dinas Perikanan Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan SDA dan SDM yang tersedia untuk meningkatkan kualitas produksi sehingga merupakan peluang untuk dikembangkan melalui penguatan teknologi yang tepat tanpa mengesampingkan kelestarian sumberdaya alam;
2. Masih kurangnya validitas data, sapsras dan infrastruktur guna membuka peluang investasi bidang Perikanan;
3. Wilayah laut dan darat merupakan potensi untuk pengembangan perikanan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kab. Paser Belum optimalnya dukungan pemerintah guna mengatasi terbatasnya sarana prasarana;
4. Wilayah Pesisir Kabupaten Paser yang berada pada kawasan Cagar Alam memberikan peluang pengembangan perikanan pada budidaya air tawar
5. Belum optimalnya keberadaan UPTD dinas, koordinasi antar bidang dan motivasi yang tinggi dari aparatur dalam memanfaatkan dukungan Pemkab, Pemprov dan pemerintah pusat dalam pemanfaatan potensi Perikanan;
6. Perlunya penataan kelembagaan dan peningkatkan kualitas kemitraan pada kelompok nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar
7. Belum dioptimalkannya kewenangan daerah dan keberadaan UPT dinas dalam menghasilkan komoditi perikanan yang kompetitif, peningkatan kelembagaan dan keterampilan nelayan, pembudidaya ikan;
8. Belum dioptimalkannya kewenangan daerah dalam mengembangkan sumberdaya Perikanan untuk dapat meningkatkan daya saing produk unggulan berbasis potensi wilayah

9. Masih kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum yang mengatur dan melindungi sumberdaya Perikanan;
10. Belum dimanfaatkannya potensi sumberdaya yang tersedia dan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dan promosi dalam pengembangan investasi;
11. Belum dioptimalkannya kewenangan daerah dalam mengembangkan sumberdaya perikanan untuk meningkatkan daya saing;
12. Perlunya keamanan produk hasil perikanan yang memenuhi standar mutu yang bebas dari penggunaan bahan terlarang seperti formalin;

a. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Paser antara lain :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan.
2. Terbatasnya jumlah petugas teknis lapangan dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Paser (10 kecamatan).
3. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan kelompok usaha Perikanan sehingga kualitas kelompok usaha secara administratif belum optimal.
4. Masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan, pengolah dan pembudidaya ikan pada umumnya menyebabkan kurangnya pemahaman dan adopsi informasi teknologi perikanan.

5. Masih rendahnya pemahaman sumberdaya manusia pelaku usaha perikanan dalam memperlakukan hasil produksi sebagai upaya peningkatan kualitas sehingga bernilai jual tinggi dan memenuhi standar ekspor.
6. Kurangnya promosi mengenai produk asal ikan dan kurang berkembangnya jaringan pemasaran yang ada.
8. Upaya peningkatan usaha sektor perikanan yang tidak didukung oleh akses layanan permodalan yang sesuai kemampuan pelaku usaha perikanan.

b. Tantangan

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kondisi iklim (cuaca) yang tidak menentu dan sulit diprediksi, mempengaruhi produktivitas usaha penangkapan ikan.
2. Infrastruktur jalan yang kurang memadai terutama jalan produksi di wilayah pesisir, sehingga kelancaran arus kegiatan perekonomian belum optimal.
3. Sebagian besar rumah tangga nelayan merupakan rumah tangga dengan kategori miskin.
4. Pemanfaatan sumberdaya kelautan masih belum optimal akibat kurang maksimalnya pemetaan potensi pesisir, Perikanan.

c. Peluang

Peluang dalam mendukung peningkatan pelayanan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Potensi luas wilayah mendukung untuk pengembangan kegiatan perekonomian sektor Perikanan.

2. Pembangunan sektor Perikanan sejalan dengan program pembangunan nasional dan program pembangunan provinsi di bidang Perikanan.
3. Permintaan pasar akan produk perikanan yang berkualitas semakin meningkat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2019 antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Guna meningkatkan perkembangan produksi ikan dalam rangka pencapaian target maka perlu dilakukan peningkatan sarana prasarana di bidang Perikanan serta peningkatan sumberdaya manusia Perikanan melalui pembinaan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.
- b. Meningkatkan kualitas produk asal ikan baik segar maupun olahan sehingga daya saing produk asal ikan dapat memenuhi standar nasional dan berkualitas ekspor.
- c. Untuk memenuhi permintaan benih ikan dan ikan konsumsi melalui peningkatan jumlah induk unggul dan peningkatan sarana prasarana produksi budidaya ikan.
- d. Dalam rangka mengatasi terbatasnya modal usaha diperlukan fasilitasi akses modal usaha melalui lembaga-lembaga ekonomi pedesaan dan dukungan lembaga-lembaga keuangan
- e. Sebagai upaya peningkatan pelayanan oleh aparatur diperlukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur dan peningkatan sarana prasarana aparatur.
- f. Rencana program dan kegiatan disusun atas pertimbangan harus sejalan dan searah dengan visi dan misi kepala daerah serta kebijakan pemerintah

provinsi dan nasional, menjaring kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan, sebagai jawaban atas perkembangan dan permasalahan di bidang Perikanan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" . Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Kerangka pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah "kemaritiman dan kelautan" dan "kedaulatan pangan". Selanjutnya visi Kementerian Perikanan ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu "Mewujudkan Kedaulatan dalam Mengelola Sumberdaya Perikanan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat".

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Kementerian Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka arah kebijakan Kementerian Perikanan tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke1 dan ke 4, serta menjabarkan misi Kementerian Perikanan yang terkait dengan kedaulatan.
- 2) Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya Perikanan yang berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi Kementerian Perikanan yang terkait dengan keberlanjutan.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan usaha Perikanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi Kementerian Perikanan yang terkait dengan kesejahteraan.
- 4) Mengembangkan Sumberdaya Manusia yang kompeten dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang inovatif. Arah kebijakan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan 3 misi yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.
- 5) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Arah kebijakan ini ditetapkan sejalan dengan program Reformasi Birokrasi.

Sejalan dengan visi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perikanan diatas, maka Dinas Perikanan Propinsi Kalimantan Timur

sebagai instansi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan pemerintahan daerah di bidang Perikanan, menetapkan tujuan dan sasaran tahunan yang sekaligus juga mendukung pencapaian sasaran, tujuan dan visi Kementerian Perikanan yaitu:

1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
2. Meningkatkan pendapatan pelaku usaha Perikanan;
3. Meningkatkan ketersediaan pangan;
4. Meningkatkan ekspor hasil perikanan;
5. Menurunnya jumlah penolakan ekspor hasil perikanan;
6. Meningkatkan luas kawasan yang dikelola secara berkelanjutan;
7. Meningkatkan pengelolaan pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar;
8. Menurunnya persentase wilayah bebas illegal fishing dan kegiatan merusak sumberdaya Perikanan;
9. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kualitas pegawai Perikanan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

3.2.1. Tujuan

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Dinas Perikanan maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan akan mengarah kepada kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2019 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2017-2021, yaitu :

- a. Tujuan : Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan yang Berkelanjutan;
Sasaran : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Perikanan
- b. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Masyarakat Perikanan untuk; Pengembangan Produk Usaha Perikanan yang Berdaya Saing, Aman dan Sehat;
Sasaran : Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Menciptakan Produk Olahan Hasil Perikanan yang Berdaya Saing, Aman dan Sehat;
- c. Tujuan : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Perikanan yang; Berkualitas;
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Data dan Informasi Perikanan;
- d. Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah
Sasaran : Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah

3.2.2. STRATEGI PEMBANGUNAN

Untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban oleh Dinas Perikanan Kabupaten Paser, maka sasaran strategis yang akan dituju adalah

- a. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan Budidaya;
- b. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan Tangkap;
- c. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- d. Peningkatan Kualitas Perencanaan Program dan Kegiatan;
- e. Peningkatan Kualitas Data Statistik dan Informasi Perikanan;
- f. Mendukung konsistensi pencapaian opini BPK WTP;
- g. Pengoptimalan kinerja penyelenggaraan SPIP dan evaluasi RENJA;

- h. Peningkatan pelayanan perangkat daerah; dan
- i. Peningkatan disiplin aparatur di lingkungan pemerintah daerah

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

Dinas Perikanan Kabupaten Paser memerlukan anggaran sebesar Rp. 7.206.926.800,- yang akan mendukung program kegiatan pembangunan perikanan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Program Pengembangan Data/Informasi
6. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan
7. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
9. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
10. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
11. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (sentra produksi)
12. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (Kualitas produk)

Penjabaran masing-masing program dan kegiatan pembangunan tahun 2019 akan dijabarkan sebagaimana pada tabel lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam menyelesaikan berbagai persoalan –persoalan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam megadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pembangunan yang berbasis kinerja.

Renja Dinas Perikanan Kabupaten Paser tahun 2019 memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perikanan Kabupaten Paser.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Paser, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Perikanan maupun di lingkup daerah.

Semoga Renja Dinas Perikanan Kabupaten Paser tahun 2019 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2019 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Tana Paser, Maret 2018

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Paser



Hj. Ira Rosana, S.Pi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720322 199603 2 003

LAMPIRAN

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Paser**

Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
		Tahun 2019	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	5	6	8	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase SKPD yang terlayani		663,016,400		827,540,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan Surat menyurat Kantor	1 Tahun	1,000,000	1 Tahun	1,100,000
Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan telepon, air & listrik	1 Tahun	27,360,000	1 Tahun	30,096,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas	5 Unit	27,360,000	5 Unit	12,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya tugas perbendaharaan	12 Bulan	265,946,400	12 Bulan	407,859,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK dinas	1 Tahun	40,000,000	1 Tahun	45,000,000
Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan	1 Tahun	53,460,000	1 Tahun	58,806,000
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhi kebutuhan bahan bacaan dinas	12 Bulan	8,400,000	12 Bulan	9,240,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan & minum Rapat	1 Tahun	39,500,000	1 Tahun	43,450,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi Tupoksi Dinas	1 Tahun	199,990,000	1 Tahun	219,989,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur		83,000,000		91,300,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	1 Paket	34,500,000	1 Paket	37,950,000
Pemeliharaan rutin/Berkala mobil jabatan	Terawatnya Mobil Jabatan	1 Unit	10,000,000	1 Unit	11,000,000
Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan dinas Operasional	Terawatnya Mobil Operasional	4 Unit	28,000,000	4 Unit	30,800,000
Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpelihara dan terpenuhinya kebutuhan Peralatan Kantor	1 Tahun	10,500,000	1 Tahun	11,550,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terselenggaranya pelaporan capaian kinerja yang akuntabel dan tepat waktu		28,745,000		31,619,500
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	1 Dokumen	13,750,000	1 Dokumen	15,125,000
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	14,995,000	1 Dokumen	16,494,500
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan di tahun yang akan datang		455,375,000		148,034,000
Penyusunan Renja SKPD	Penyusunan Renja SKPD	1 Dokumen	8,190,000	1 Dokumen	9,009,000
Konsolidasi Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat	4 Milyar	62,750,000	4 Milyar	69,025,000
Pengumpulan, Penyusunan dan Penyajian Data Usulan Kegiatan Perencanaan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	1 Dokumen	384,435,000	1 Dokumen	70,000,000
	Penelitian identifikasi dan inventarisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan				
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan			34,707,000		35,746,200
Evaluasi Renja SKPD	Jumlah dokumen yang dievaluasi (dokumen)	1 Dokumen	10,392,000	1 Dokumen	11,431,200
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen move dan pelaporan yang disusun	2 Dokumen	24,315,000	2 Dokumen	24,315,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
		Tahun 2019	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	5	6	8	9
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan			224,950,000		252,705,000
Pembinaan dan pengembangan Lembaga Usaha Kelompok Pembudidaya Ikan	Cakupan bina POKDAKAN (kelompok)	30 Pokdakan	70,250,000	30 Pokdakan	77,275,000
Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Usaha Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah KUB yang terbina (kelompok)	30 KUB	102,100,000	30 KUB	112,310,000
Pembinaan Kelembagaan Usaha dan Kelompok P2HP	Jumlah Poklahsar yang dibina (kelompok)	30 Poklahsar	52,600,000	30 Poklahsar	63,120,000
Program Pengembangan Data/Informasi			348,032,000		382,835,200
Pengumpulan, Penyusunan dan Penyajian Pengembangan Kegiatan Data Statistik Budidaya	Data statistik perkembangan budidaya yang akurat (dokumen)	1 Dokumen	80,265,000	1 Dokumen	88,291,500
Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap	Penyajian data statistik perikanan tangkap yang akurat dan tepat waktu (dokumen)	1 Dokumen	98,362,000	1 Dokumen	108,198,200
Pengumpulan, Penyusunan dan Penyajian Perkembangan Kegiatan Data Statistik P2HP	Data statistik perkembangan P2HP yang akurat (dokumen)	1 Dokumen	144,305,000	1 Dokumen	158,735,500
Penyusunan Data Statistik Sektor Kabupaten (Kelautan dan Perikanan)	Penyajian data statistik sektoral yang akurat dan tepat waktu (dokumen)	1 Dokumen	25,100,000	1 Dokumen	27,610,000
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tingkat maturitas SPIP (Level)		13,924,000		15,316,400
Pelaksanaan SPIP di SKPD	Jumlah kegiatan yang dinilai resikonya	1 Dokumen	13,924,000	1 Dokumen	15,316,400
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)		1,720,811,200		2,173,475,440
Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Alat penangkap ikan/Alat bantu		480,787,400	550	850,000,000
	Alat penangkap ikan	600 Set		550 Set/Unit	
	Mesin Ketinting	20 Unit		50 Unit	
Pelatihan, Bimbingan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Penangkapan Ikan	Jumlah peserta pelatihan yang meningkat kemampuannya	30 orang	508,815,000	90 orang	325,000,000
Pengembangan dan Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPI	1 Tahun Operasional	374,394,600	1 Tahun Operasional	350,000,000
Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan dan Perlindungan Nelayan	Terwujudnya operasi penangkapan ikan yang RAMLI melalui adopsi inovasi teknokapi	2 Paket	100,000,000	1 Paket	300,000,000
Pengembangan Perizinan Perikanan Tangkap	Jumlah kelengkapan perizinan penangkapan ikan skala kecil	350 Dokumen	91,418,000	350 Dokumen	150,000,000
Pengeolaan Pengendalian dan Perlindungan SDI	Meningkatnya Stock Sumberdaya Ikan dalam rangka keseimbangan potensi lestari	2 Paket	165,396,200	150.000 Ekor	198,475,440
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)		1,287,282,100	1 Tahun	2,164,152,000
Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah produksi benih unggul UPTD (juta ekor)	4,3 Juta Ekor	348,408,300	4,5 Juta Ekor	552,152,000
Pendampingan Pada Kelompok Pembudidaya Ikan	Jumlah penerima manfaat sapsras produksi budidaya (perorangan/kelompok) (orang)	75 Pokdakan	740,840,800	85 Pokdakan	1,232,000,000
	- Mesin Cas/Ketinting	40 Unit			
	- Mesin Pompa Iar	42 Unit			
	- Mesin Giling Pakan	2 Paket			
	- Lantai Jemur	1 Paket			
Pelatihan dan Bimbingan Usaha Budidaya Perikanan	- Jumlah pembudidaya ikan yang dilatih teknis budidaya (orang)	30 Peserta	143,878,000	30 Peserta	300,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
		Tahun 2019	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	5	6	8	9
Pecegahan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Jumlah kasus yang tertangani (kali)	20 Kali	54,155,000	20 Kali	80,000,000

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Luas kawasan budidaya perikanan (ha)		450,918,800		795,791,940
Pembinaan dan pengembangan Perikanan	Luas Kawasan budidaya Perikanan	20.429 Ha	351,725,000	21.315 Ha	675,000,000
	- Budidaya Ikan Lele	1 Paket			
	- Benih Ikan Air payau	1 Paket			
Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan	Bertambah luasnya lahan budidaya perikanan	20 Ha	58,393,800	20 Ha	75,911,940
Peningkatan Perizinan Perikanan Budidaya	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan layanan usaha perijinan (orang)	150 Dokumen	40,800,000	150 Dokumen	44,880,000
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (Kualitas Produksi)	Persentase produk perikanan yang memiliki standar mutu		563,030,000		255,000,000
Pengawasan Mutu dan Pemasaran/Perdagangan Hasil - Hasil Perikanan	Jumlah hasil produk perikanan yang diuji (sampel)	70 Sampel	348,855,000	50 Sampel	175,000,000
	Penyediaan Sarana dan prasarana Laboratorium Mutu (skala mini)	1 Paket			
Promosi Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah	Jumlah kegiatan promosi yang diikuti (kegiatan)	4 Kali	214,175,000	4 Kali	80,000,000
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (Sentra Produksi)	Jumlah produk olahan hasil perikanan (ton)		1,333,135,300		582,218,400
Pembangunan & Peningkatan Sarana & Prasarana Penunjang Pengelolaan, Pengolahan & Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang P2HP	60 Poklahsar	1,120,016,100	60 Poklahsar	300,000,000
	Operasional Pabrik Es				
	- Pengadaan Cool Box	10 Buah			
	- Pengadaan Freezer	5 Buah			
	- Mesin Pengereng Rumput Lait	2 Paket			
	- Mesin Presh Rumput Laut	1 Paket			
Pengembangan Aquabisnis	Partisipasi masyarakat yang mengikuti gemarikan	175 Orang	110,182,000	175 Orang	132,218,400
Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	Jumlah poklahsar yang dilatih (orang)	50 Orang	102,937,200	50 Orang	150,000,000
BELANJA LANGSUNG			7,206,926,800		7,755,734,080
GAJI PNS (BTL)			4,645,498,737		5,726,537,757
TOTAL			11,852,425,537		13,482,271,837

Pana Paser, Maret 2018
 Kepala Dinas,

Hi Ina Rosana, S.Pi, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720322 199703 2 004